

PERAN PEMERINTAH DESA GAMBIRAN DALAM MENGATASI PHK MASSAL PT. CJ FEED AND CARE INDONESIA

Jupri Deri¹

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darul Ulum Jombang

Khudrotun Nafisah²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darul Ulum Jombang

Abu Tazid³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darul Ulum Jombang

Email: ldjuprideri@gmail.com

Abstrak

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan masalah yang kompleks, karena mempunyai hubungan dengan masalah ekonomi maupun psikologi bagi tenaga kerja yang terkena dampak PHK. Permasalahan terjadi pada perusahaan pakan PT CJ Feed and Care Indonesia yang berdomisili di Desa Mojoagung yang mengalami penurunan omset secara drastis akibat pandemi, sehingga pada tahun 2022 dan 2023 secara bertahap melakukan PHK massal. Padahal karyawan di perusahaan ternak tersebut 80 persen berasal dari desa Gambiran Mojoagung, sehingga terjadi beban ekonomi pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *case study* dengan menggunakan *indepth interview* dan observasi partisipan sebagai teknik pengumpulan data. Sementara untuk teknik penentuan informan penelitian ini menggunakan purposif sebagai teknik analisis data serta menggunakan Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian. Sedangkan, berdasarkan dari hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa (1) Peran pemerintah desa Gambiran mengatasi permasalahan PHK massal yang dilakukan PT. CJ Feed melalui peran partisipatif, artinya pemerintah desa yang awalnya di kritik keras turut serta dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan fasilitasi secara intensif dengan pihak perusahaan dan karyawan yang berasal dari desa Gambiran melalui berbagai kesepakatan. Selain itu, bentuk peran pemerintah desa dalam mengatasi masalah tersebut dengan mendistribusikan karyawan terdapat pada pekerjaan formal maupun informal termasuk membuat kebijakan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat terdampak dengan berbagai bentuk dan program. (2) Diperoleh hasil konkrit dari kebijakan pemerintah desa tersebut adalah berkurangnya tekanan ekonomi yang awalnya dirasakan, karena dampak PHK massal membuat bersangkutan tidak punya penghasilan untuk menunjang kehidupan keluarga. Meskipun diakui hasil yang diperoleh saat ini masih jauh dari gaji bulanan saat menjadi karyawan karena ada yang 3, 4, sampai 5 juta perbulan, sedangkan gaji atau usaha mandiri saat ini yang dijalani berkisar antara 1,5-2,5 juta.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, PHK massal, Beban Ekonomi, Fasilitasi;

PENDAHULUAN

Ancaman terjadinya resesi di tahun 2023 perlu diwaspadai oleh semua kalangan masyarakat. Kekhawatirannya perihal pemberian upah kepada para karyawan yang tidak setara dengan terjadinya kenaikan kebutuhan kebutuhan dan harga-harga barang konsumsi. Dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi, perusahaan tidak akan mampu untuk menaikkan gaji maupun tunjangan untuk para karyawan, mereka justru akan berusaha meminimalisir pengeluaran baik dari sisi produksi maupun dari sisi personalia. Hal ini tentunya akan sangat membebani masyarakat karena bisa saja terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Tidak semua orang mengharapkan ingin menganggur, tentunya setiap orang menginginkan keberlangsungan hidup dengan mendapatkan pekerjaan yang sesuai di era sekarang dimana persaingan kerja yang sangat ketat. Ada beberapa jenis pengangguran, (1) pengangguran

terselubung merupakan seseorang yang tidak bekerja secara maksimal dikarenakan alasan tertentu, (2) setengah menganggur merupakan seseorang yang bekerja kurang dari 35 jam per-minggu, (3) pengangguran terbuka merupakan seseorang yang betul-betul tidak memiliki pekerjaan.

Pengangguran tidak disengaja terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang sedang lesu yang mempengaruhi terhadap keuntungan, dengan demikian banyak perusahaan- perusahaan yang mengalami kebangkrutan sehingga harus memberhentikan tenaga kerja (PHK). Pengangguran disengaja merupakan seseorang yang sebenarnya mampu dan bisa mencari pekerjaan yang layak hanya saja memilih untuk tidak bekerja. Pengangguran gesekan terjadi dikarenakan tidak adanya keseimbangan antara permintaan tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan (*supply and demand of labor*). Sehingga calon pekerja tidak bisa menemukan pekerjaan di karenakan beberapa alasan seperti, tempat yang jauh, upah tidak sesuai dengan ekspektasi dan belum ada lapangan pekerjaan.

Faktor yang menyebabkan banyaknya orang menganggur di sebabkan beberapa hal diantaranya adalah Jumlah tenaga kerja tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Di era industri 4.0 ini justru membuat perusahaan lebih memilih memperkejakan robot atau mesin di bandingkan dengan manusia di karanakan robot atau mesin lebih efesien. Di era industri 4.0 peningkatan kemampuan sumber daya manusia harus di tingkatkan dengan dibekali sertifikasi keahlian. Peningkatan kualitas pendidikan yang masih kurang. Angka kemiskinan masih tinggi. Terjadinya pemberhentian secara masal (PHK). Lokasi kerja yang jauh dari tempat tinggal. Tidak bisa bersaing secara global. Lapangan pekerjaan yang sulit di dapat. Ekspektasi dari calon pekerja yang terlalu tinggi.

Akan tetapi, faktor covid-19 pada tahun 2020 secara bertahap memiliki pengaruh yang kuat terhadap eksistensi dan survavilensi ekonomi dan dunia industry terutama yang terlihat di desa Gambiran, Jombang, yaitu kondisi PHK massal yang dilakukan PT.CJ Feed and Care Indonesia. Perusahaan itu di bidang produksi pakan ternak PT CJ Feed and Care Indonesia juga menimbulkan kerugian bagi petani ternak baik itu dalam pemasaran,dan produksi. dampak dari hal tersebut perusahaan produksi pakan mengalami penurunan yang sangat drastis di semua bidang. Baik itu perusahaan produksi maupun yang lainnya, sehingga perusahaan mendekati kebangkrutan. dari dampak tersebut para peternak mengalami penurunan produksi ternak sehingga mengakibatkan produksi ternak menurun juga harga jual ternak yang terlalu murah ditambah dengan kondisi daya beli masyarakat yang sangat kecil. Hal tersebut mengakibatkan para petani dan peternak mengalami kerugian besar.

Kondisi pasar yang tidak stabil menimbulkan risiko pembiayaan. Banyaknya perusahaan yang terkena dampak dari pandemi mengakibatkan kondisi pasar yang tidak stabil. Tentunya hal tersebut mengakibatkan para pengusaha harus bisa melakukan segala cara untuk mempertahankan bisnis dan perekonomiannya tetap stabil. Hanya sebagian kecil dari perusahaan yang mampu bertahan di masa pandemi, beberapa perusahaan lainnya terpaksa harus merelakan bisnisnya yang mengalami kebangkrutan, sehingga terjadi Pemutusan hubungan kerja masal oleh perusahaan memiliki konsekuensi sosial yang jelas mengarah pada konflik antara perusahaan dan karyawannya. Sehingga hal tersebut menuntut peran pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan tersebut, karena berpotensi menimbulkan keguncangan ekonomi pada masyarakat Gambiran pada khususnya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus, dimana pengertian penelitian studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer (obyek sedang berlangsung atau telah berlangsung tetapi masih menyisakan dampak dan pengaruh yang luas, kuat atau khusus pada saat penelitian dilakukan yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, dengan menggunakan berbagai sumber data. Pemilihan penelitian studi kasus dikarenakan obyek penelitiannya hanya di satu tempat dan kegiatannya masih berlangsung serta bersifat

mendalam yaitu hanya di PT. CJ Feed And Care Indonesia, Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dengan fokus penelitian terjadi dampak PHK dan upaya proteksi yang dilakukan oleh pemerintah desa, khususnya kebijakan Kepala Desa Gambiran. Adapun prosedur atau tahap-tahap penelitian studi kasus adalah sebagai berikut : (1) menentukan isu permasalahan, (2) menentukan atau mencari landasan teori yang mendukung, (3) menentukan metodologi penelitian, (4) melakukan analisis data, dan (5) membuat kesimpulan.

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi yang dilakukan dengan sumber data yang relevan dengan permasalahan tersebut. Setelah itu dilakukan reduksi data, penyajian data, verifikasi, kesimpulan serta analisis. Selain itu, pemeriksaan keabsahan data dilakukan transeferabilitas, depandabilitas serta **Audit trail** dapat dilakukan dengan cara peneliti mengkonsultasikan hasil temuan penelitian dengan pihak eksternal untuk menilai kredibilitas metode pengumpulan data, temuan dan interpretasi yang dibuat. Pihak eksternal yang dipilih adalah orang yang memahami fenomena dan independent. Pelaksanaan audit trail dilengkapi dengan catatan-catatan pelaksanaan keseluruhan proses dan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Kepemimpinan merupakan aspek penting dalam menjadikan berbagai permasalahan masyarakat atas peristiwa PHK massal dapat di atasi meskipun secara merata belum seluruhnya, karena upaya pemerintah desa melalui kebijakan kepala desa dapat tersampaikan pada masyarakat terutama pendekatan komunikasi persuasif yang dilakukannya terhadap semua golongan, membuat segala program dan apa yang menjadi visinya dapat terealisasi. Komunikasi persuasif kepala desa dapat melibatkan penggunaan retorika yang kuat, argumen logis, emosi, bukti nyata, dan keahlian komunikasi interpersonal.

Selain itu, kepala desa juga dapat menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan warga dalam pengambilan keputusan dan merancang program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam hal ini, kepala desa berusaha membangun hubungan saling percaya dan membangun dukungan dari warga desa untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagai kepala desa, ada beberapa metode komunikasi yang dapat dilakukan untuk berinteraksi dengan warga desa dan memfasilitasi aliran informasi. Berikut ini beberapa metode komunikasi yang umum dilakukan oleh kepala desa:

1. Pertemuan Langsung: Kepala desa dapat mengadakan pertemuan langsung dengan warga desa untuk membicarakan berbagai masalah dan mendengarkan aspirasi serta kebutuhan mereka. Pertemuan semacam ini dapat dilakukan secara berkala, seperti pertemuan bulanan atau ad hoc ketika ada isu penting yang perlu dibahas.
2. Penggunaan Media Sosial: Kepala desa dapat memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram untuk berkomunikasi dengan warga desa. Melalui akun media sosial resmi, kepala desa dapat membagikan informasi terkait kegiatan pemerintahan desa, pengumuman, atau berinteraksi langsung dengan warga yang mengajukan pertanyaan atau keluhan.
3. Surat Pemberitahuan: Kepala desa juga dapat menggunakan surat pemberitahuan resmi untuk mengkomunikasikan informasi penting kepada warga desa. Surat-surat ini dapat dikirim langsung ke rumah warga atau dipasang di tempat-tempat umum seperti balai desa, sekolah, atau tempat ibadah.
4. Sosialisasi dan Rapat Kelompok: Kepala desa dapat melakukan sosialisasi atau rapat kelompok dengan masyarakat desa untuk membahas isu-isu tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan mengundang kelompok-kelompok tertentu, seperti kelompok tani, kelompok ibu-ibu, atau pemuda desa, untuk mendiskusikan masalah-masalah yang relevan dengan kelompok tersebut.
5. Pelayanan Publik: Kepala desa juga dapat membuka kantor pelayanan publik di balai desa atau

tempat yang mudah diakses oleh warga. Melalui pelayanan publik ini, warga dapat mengajukan pertanyaan, mengajukan permohonan administrasi, atau menyampaikan keluhan langsung kepada kepala desa atau staf yang ditunjuk.

6. Pendekatan Personal: Kepala desa juga bisa melakukan pendekatan personal dengan warga desa, seperti melalui kunjungan rumah ke warga yang membutuhkan perhatian khusus. Pendekatan ini membantu dalam memahami masalah yang dihadapi oleh warga secara lebih mendalam dan menunjukkan kepedulian kepala desa terhadap kebutuhan masyarakat.

Akan adanya hal tersebut penting bagi seorang kepala desa untuk memilih metode komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik warga desa serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, karena apabila metode komunikasi yang dipilih oleh kepala desa salah, maka akan mengakibatkan kesalahpahaman dan ketidakseimbangan informasi antara pemimpin dengan kepala desa.

Dalam hal ini pemerintah desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang menjadikan model *participatory action policy* sebagai upaya menyelesaikan masalah tersebut sehingga diharapkan mampu menjadi salah satu kunci pembangunannya yang berhasil. Keberanian kepala desa sebagai *top leader* melahirkan kebijakan yang solutif terhadap persoalan dalam membangun pembangunan desa yang peduli terhadap apapun problem yang dihadapi masyarakat dengan cara melakukan komunikasi *direct persuasive* sebagai *rational choice* (Coleman, 1995) dalam mengatasi permasalahan desa, dimana kepala desa selalu melibatkan masyarakat dengan cara mengumpulkan dalam rapat desa mendiskusikan persoalan PHK massal tersebut, padahal awalnya masyarakat melakukan demonstrasi pada pemerintah desa.

Tujuan adanya rapat desa dilakukan adalah untuk memberi wadah kepada masyarakat mengenai pendapat yang ingin disampaikan serta untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Selanjutnya pendapat dan permasalahan yang telah disampaikan tersebut akan dicarikan solusi serta di musyawarahkan untuk mencapai hasil yang mufakat. Tingkat partisipasi masyarakat yang paling sederhana dan lazim diberikan oleh anggota masyarakat dalam membantu mensukseskan pelaksanaan suatu program pembangunan adalah berupa tenaga atau dapat disebut dengan gotong royong merupakan cara rasional untuk dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut, termasuk kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat terdampak PHK dan *stake holders* sehingga kondusifitas desa Gambiran masih dapat dijaga. Jika mengacu pada pendapat Siagian (2005), menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa.

Peran kepemimpinan persuasif dalam mengatasi persoalan PHK massal di desa Gambiran mengatasi berbagai persoalan, sebab pembangunan desa juga dapat berjalan dengan baik apabila pemerintah desa memiliki hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak terkait. Artinya jika terkait dengan pembangunan jadi kalau hubungan kita harmonis di semua lembaga, maka dalam menjalankan semua program akan terasa enteng (mudah). Pembangunan yang dilakukan oleh desa Gambiran juga tidak lepas dari kontribusi yang selalu diberikan masyarakat. Pemerintah desa dan masyarakat bersinergi dengan baik demi mewujudkan berbagai program pembangunan desa terutama mengatasi permasalahan di tengah masyarakat.

Jika mengacu pada pemikiran yang mengembangkan konsep dan teorinya mengenai modal sosial, Coleman menanamkan konteks dan latar teori pilihan rasional (*rational choice theory*). Teori ini didasarkan oleh asumsi adanya saling ketergantungan yang menghubungkan sesama aktor di dalamnya suatu sistem sosial. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sumber daya yang tersedia dikendalikan oleh aktor lain yang kemungkinan berada di luar dari sistem sosial mereka. Artinya dalam mengatasi permasalahan PHK massal hubungan aktor yang terdiri dari para korban dengan pemerintah desa merupakan pilihan rasional melalui partisipasi desa mengatasi permasalahan.

Bahkan "*utilities*" (Coleman, 2008).yaitu saling memanfaatkan menjadi sumber daya yang besar dalam membangun representasi antara sumber daya yang saling terhubung melalui hubungan kepala desa sebagai pemimpin desa dengan pemerintah desa sebagai organisasi sosial bagi masyarakat yang memiliki nilai pelayanan public kepada masyarakat Gambiran yang memiliki masalah.

Dalam *rational choice* masyarakat mengadukan masalahnya kepada kepala desa dan pemerintahan desa sebagai mediator dan fasilitator melekat berkaitan dengan masalah-masalah beban ekonomi, sehingga dalam transaksi ekonomi seperti menuntut desa mampu berbicara dengan perusahaan melahirkan dua kutub hubungan sosial sangat penting untuk menghasilkan kepercayaan, dalam menetapkan ekspektasi, dan dalam menciptakan dan menegakkan norma (Coleman 1995). Singkatnya, sumber daya struktur sosial ini bagi Coleman merupakan kekayaan modal bagi individu (Coleman, 2008).

Terdapat berbagai kebijakan sebagai pilihan rasional dari pemerintah desa Gambiran seperti yang dijelaskan para informan, terutama Ibu Mujiana (55), Ibu Zulaida (37), bahwa pendekatan partisipatif pemerintah desa dalam menjembatani masalah yang dihadapi masyarakat desa Gambiran telah melahirkan kepercayaan berdasarkan sumber daya khusus yang bersifat produktif dan berfungsi untuk memfasilitasi pencapaian tujuan tertentu yang tidak mungkin terjadi jika tidak ada. Artinya, modal sosial dalam bentuk khusus sangat berharga dalam memfasilitasi tindakan tertentu, tetapi mungkin saja dipahami berbeda atau bahkan berbahaya bagi orang lain.

Pilihan rasional pemerintah desa Gambiran menjadikan *partisipatory action* sebagai upaya memecahkan masalah PHK massal, bahkan persoalan ekonomi masyarakat lainnya telah menjadi karakter pemimpin dan birokrasi desa yang dipimpinnya sebagai barang publik (Coleman 1995). Tidak seperti cara modal fisik dibuat dengan mengubah bahan menjadi alat yang memfasilitasi produksi, dan cara modal manusia dibuat dengan memodifikasi dan meningkatkan keterampilan dan kemampuan orang, modal sosial muncul melalui perubahan hubungan di antara orang-orang yang memfasilitasi tindakan. Itu berarti eksistensi modal sosial hanya dapat dirasakan dampaknya. Ketiga jenis modal ini (modal fisik, modal manusia dan modal sosial) memiliki fakta bahwa mereka memfasilitasi kegiatan produktif yang sama (Coleman 1995).

Modal fisik dan modal manusia adalah barang pribadi, Mereka yang berinvestasi di dalamnya menuai keuntungan yang dihasilkan. Tetapi modal sosial tidak memiliki karakteristik ini; itu adalah barang publik. Dengan demikian, tidak hanya pelaku investasi yang memperoleh keuntungan dari modal sosial, tetapi juga pelaku lain yang menjadi bagian dari manfaat struktur sosial. Struktur sosial memungkinkan terbentuknya norma-norma sosial. Norma tersebut akan menentukan tindakan mana yang dipandang tepat dan benar oleh sekelompok aktor yang dengan sengaja menetapkan atau mendukung suatu norma.

Meskipun modal sosial memiliki karakteristik barang publik ini, namun kenyataannya tidak semua orang memberikan kontribusi yang menguatkan eksistensi modal sosial di tengahnya mereka. Beberapa aktor membangun modal sosial (misalnya meminta bantuan dari aktor lain) sebagai tujuan sampingan, sambil tetap konsisten harapan pribadinya untuk memaksimalkan potensi mereka ddi dalam masyarakat.

Orang yang memiliki orientasi politik yang sama cenderung memiliki kesamaan dalam melihat suatu fenomena sosial. Selanjutnya, modal sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, khususnya berkaitan dengan dimensi kesejahteraan. Dalam masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, negara menyediakan jaminan sosial yang memadai apabila kondisi masyarakat berada dalam keadaan yang tumbuh ancaman sosial di dalamnya. Namun demikian, kondisi ini dapat menimbulkan modal sosial menjadi sedikit merenggang akibat ketergantungan dari orang-orang sekitar akan bergeser kepada ketergantungan kepada negara. Menurut Coleman, situasi yang demikian akan memberikan dampak negatif kepada modal sosial. Modal sosial kehilangan nilai dari waktu ke waktu seperti modal fisik atau manusia. Secara konkret, fragmen hubungan sosial, harapan dan kewajiban kehilangan kepentingan dan norma-norma berakhir (Coleman, 2008).

Akan tetapi jika melihat apa yang dilakukan pemerintah desa Gambiran justru menciptakan fragmen relasi yang menguatkan kepercayaan public pada pemerintah desa, karena cara yang digunakan dianggap cukup efektif dalam mengatasi permasalahan meskipun belum sepenuhnya optimal. Namun dalam realitas sosial ini tetap dalam relasi yang dilandasi oleh rasa saling percaya atau hubungan yang berbasis kepada kewenangan atau otoritas. Berdasarkan proses persuasi yang dilakukan dengan berbagai upaya, yaitu:

- a. **Sikap saling percaya** menciptakan jaringan yang kohesif dan organisasi sosial yang lebih adaptif terhadap keadaan. Jaringan ini dicirikan oleh potensi informasi dan norma yang efektif. Hubungan Saling Percaya Hubungan yang dilandasi oleh sikap saling percaya dapat muncul apabila terdapat interaksi timbal balik yang saling menguntungkan.
- b. **Hubungan berbasis kewenangan atau otoritas**, hubungan ini diartikan sebagai terwujudnya pendelegasian urusan tertentu, dimana salah satu pihak berada lebih tinggi dari pihak lainnya. Hubungan ini dapat dianalogikan secara sederhana, yaitu pihak A mengalihkan suatu kewenangan untuk mengendalikan suatu pekerjaan kepada pihak.
- c. **Norma Efektif**, merupakan norma yang efektif dapat diartikan sebagai modal sosial yang kuat. Norma ini memfasilitasi atau menjustifikasi atas tindakan tertentu; namun juga menjadi pembatas atas tindakan tertentu lainnya yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang dianut.
- d. **Organisasi Sosial** yang Sesuai dengan konteks tertentu Organisasi yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu juga dapat dimaksimalkan dalam mencapai tujuan yang lainnya.

Pembangunan Partisipatif

Upaya persuasif dengan pendekatan model partisipatif aksi dari pemerintah desa dalam menjembatani masalah yang dihadapi masyarakat gambiran pada tahun 2022 sampai tahun 2023 berkaitan dengan PHK massal PT CJ Feed, bagaimanapun menciptakan relasi publik dengan kepentingan bersama, sehingga pembangunan yang dituju adalah keadilan yang berorientasi pada welfare. Negara hukum adalah negara yang dalam menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang didasarkan pada suatu hukum.

Berbagai cara yang dilakukan pemerintah desa tidak lepas dari pilihan rasional yang dilakukan kepala desa dengan beserta jajarannya dalam mengatasi persoalan tersebut, padahal awalnya diragukan oleh masyarakat. Adapun cara partisipatif aksi yang dilakukan adalah:

- a. **Fasilitasi Usaha Masyarakat** : Kemampuan pemerintah desa mengatasi permasalahan PHK massal dan persoalan ekonomi masyarakat telah disampaikan oleh 9 informan yang menyatakan bahwa pemerintah desa berperan dalam upaya mengatasi permasalahan PHK massal baik ikut memediasi mantan karyawan yang di putus kerjanya oleh perusahaan dengan pemilik dan pengelola perusahaan meskipun pada akhirnya pemutusan kerja itu tidak bisa dihindarkan karena kondisi perusahaan sedang mengalami penurunan omset karena pandemi. Meskipun demikian, terdapat kebijakan yang cepat dilakukan dengan memfasilitasi masyarakat untuk berwirausaha maupun merantau ke Kalimantan.
- b. **Keberhasilan Pengadaan Program Bumdes** : Hal penting juga dilakukan karena berdasarkan pembangunan keadilan yang disampaikan Coleman. Sehingga, berbagai Bumdes yang dimiliki desa dan dikelola oleh desa mampu jadi tempat untuk menampung 50 persen mantan pegawai PT. CJ Feed, dari berbagai bidang kerja, diantaranya ada yang bekerja di Pengelolaan Sampah Desa, kantin Desa, Parkir-Parkir di Pasar Desa, Pengelolaan Ponten, hingga menciptakan jiwa wirausaha dan banyak yang membuat produk makanan ringan yang difasilitasi desa.
- c. **Transparansi Dana Desa** : Transparansi menjadi syarat penting yang harus dipenuhi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penggunaan anggaran pembangunan, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun Kelurahan/Desa. Tak terkecuali pengelolaan keuangan desa oleh para Perangkat Desa yang harus sesuai dengan rencana penyusunannya. Transparansi yang dimaksud adalah

dengan terbuka menyusun penggunaan dana desa kepada masyarakat. Bentuknya bisa dalam papan informasi penggunaan yang terpampang di Balai Desa. Bahkan sistem pelayanan yang solutif dengan sistem birokrasi desa yang rapi dan disiplin menjadikan pengelolaan dana secara transparan. Sehingga, 2 tahun pembangunan Gedung Olahraga juga bisa dijadikan salah satu sumber pendapatan desa.

d. Partisipasi masyarakat : Adanya partisipasi dari masyarakat juga penting, karena menurut Soetrisno (1995) mendefinisikan partisipasi sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang ditentukan dan tujuannya oleh pemerintah. Dia juga menambahkan bahwa partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Peranan masyarakat dalam pembangunan desa merupakan kerjasama yang erat antara aparatur desa dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, memelihara dan mempertahankan hasil pembangunan yang telah terwujud. Keberhasilan pembangunan desa mengatasi permasalahan PHK massal tahun 2022 sampai tahun 2023 yang dilakukan PT. CJ Feed tidak terlepas dari partisipasi semua pihak terutama yang dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga terbangun tujuan-tujuan pembangunan desa :

1. Menuju masyarakat yang lebih bertanggungjawab
2. Meminimalisir perasaan terasing
3. Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah
4. Menciptakan kesadaran kolektif

PENUTUP

Terdapat beberapa kebijakan starategis yang dilakukan oleh pemerintah desa sebenarnya dalam upaya mengatasi permasalahan pemutusan hubungan kerja masal, yaitu:

1. Peran pemerintah desa Gambiran mengatasi permasalahan PHK masal yang dilakukan PT. Cj Feed melalui peran partisipatif, artinya pemerintah desa yang awalnya di kritik keras turut serta dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan fasilitasi secara intensif dengan pihak perusahaan dan karyawan yang berasal dari desa Gambiran melalui berbagai kesepakatan. Selain itu, bentuk peran pemerintah desa dalam mengatasi masalah tersebut dengan mendistribusikan karyawan terdapat pada pekerjaan formal maupun informal termasuk membuat kebijakan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat terdampak dengan berbagai bentuk dan program, diantaranya, pemberian izin berjualan di depan balai desa yang sebelumnya di larang, memberikan tempat di pasar Gambiran, pasar hewan Gambiran, hingga memberikan tempat usaha di rest area dengan sistem sewa tempat, melakukan rekrutmen pada masyarakat terdampak dengan memberikan pekerjaan pada program padat karya desa terutama proyek-proyek pembangunan desa, seperti pembangunan jalan, plengsengan, Gedung olahraga dan berbagai pembangunan yang dilakukan desa serta Ditempatkan sebagai pengelola Bumdes, mulai dari pengelolaan sampah, pengelolaan Gedung olahraga, café desa, petugas parkir, petugas penjaga ponten desa hingga pengelola rest area. Selain itu, memberikan pendampingan penuh secara gratis dengan fasilitasi pengurusan NIB, HAKI merek dagang pada usaha-usaha rumahan yang semakin tumbuh pada era pandemi hingga hari ini.
2. Diperoleh hasil konkrit dari kebijakan pemerintah desa tersebut adalah berkurangnya tekanan ekonomi yang awalnya dirasakan, karena dampak PHK massal membuat bersangkutan tidak punya penghasilan untuk menunjang kehidupan keluarga. Meskipun diakui hasil yang diperoleh saat ini masih jauh dari gaji bulanan saat menjadi karyawan karena ada yang 3, 4, sampai 5 juta perbulan, sedangkan gaji atau usaha mandiri saat ini yang dijalani berkisar antara 1,5-2,5 juta.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik, Filsafat, Paradigma, Teori, Strategi Dan Komunikasi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bachri, Bachtiar S. 2010. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10 (1): 54.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Universitas Arlangga.
- . 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, Lexi J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- . 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Soemarwoto O. 2001. *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Soemarwoto O. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press; 2003.
- Suparmoko M. *Ekonomika Lingkungan*. Yogyakarta: BPFE; 2003.
- Supangkat, S. H. (2016). Tantangan dan Peluang Pembangunan Smart City. Bekasi. Retrieved from <https://docplayer.info/30949488-Tantangan-dan-peluang-pembangunan-smart-city-prof-suhono-harso-supangkat.html>
- Zaeni Asyhadie. 2013. *Hukum Kerja (Hukum Bidang Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*. Cetakan ke 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Sumber
- Jurnal dan Karya Ilmiah**
- Marnelly T.R. 2012. Corporate Sosial Responsibility (CSR) :Tinjauan Praktik dan Teori di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis*,
- Fatwal Fahrurnisa, Rosdianti Razak, Alimuddin Said. 2017 . Peran Pemerintah Dalam Menangani Konflik Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Pt Gunung Mas Di Kabupaten Pangkep.
- Estu Widiyowati, Rachmat Kriyantono, dan Bambang Dwi Prasetyo . 2018. Dialog Dan Mediasi: Perspektif Komunikasi Konflik Dalam Strategi Manajemen Konflik (Studi Fenomenologi Terhadap Konflik Perguruan Pencak Silat Di Madiun – Jawa Timur)
- M. Fatah Fuqaha. 2015. Peran Pemerintah Dalam Resolusi Konflik Hubungan Industrial Di Pt. Duta Palma Nusantara Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi 2011– 2014